



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	36 (tiga puluh enam)
Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang).
Hari, Tanggal	:	Kamis, 22 September 2022
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Martin Manurung, S.E., M.A/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Penyesuaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.
Hadir	:	1. Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Kepala BSN, Saudara Kukuh S. Achmad; 3. Ketua KPPU, Saudara Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum; 4. Kepala BP Batam, Saudara Muhammad Rudi; dan 5. Kepala BPKS, Saudara Junaidi Ali, S.H. S.T. M.T. Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang). pada pukul 10.29 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 22 September 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung., S.E., M.A.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian/Lembaga Negara Tahun Anggaran 2023 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI No. B/16721/AG.05.02/09/2022, Tanggal 20 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebesar Rp.227,2 Miliar;
- b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp113,1 Miliar;
- c. BP Batam sebesar Rp2.068,2 Miliar;
- d. BPKS Sabang sebesar Rp66,5 Miliar.

Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan menyampaikan hasil keputusan ini kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan.

2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKPB) Sabang terkait dengan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp48,774,168,000,- (*Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kedeputian Teknik, Pengembangan, dan Tata Ruang sebesar Rp44,935,668,000,- (*Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- b. Kedeputian Komersial dan Investasi sebesar Rp3,838,500,000,- (*Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

Selanjutnya Komisi VI DPR RI mendukung untuk disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan.

3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dengan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp116.955.021.000,- (*Seratus Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- c. Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar Rp87.121.257.000,- (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
- d. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp48.687.798.000,- (*Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Selanjutnya Komisi VI DPR RI mendukung untuk disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan.

- 4. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Batam, dan Kepala BPKS Sabang, untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Catatan:

Komisi VI DPR RI memberikan dukungan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melanjutkan proses penyelidikan dugaan monopoli oleh Google dan dugaan persaingan usaha tidak sehat (*predatory pricing*) oleh Shopee dan keterkaitannya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.50 WIB.

**KEPALA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Ttd.

KUKUH S. ACHMAD

**KETUA KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

Ttd.

DR. M. AFIF HASBULLAH, S.H., M.HUM

**KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN BATAM**

Ttd.

MUHAMMAD RUDI

**KEPALA BADAN
PENGAWASAN KAWASAN SABANG**

Ttd.

JUNAIDI ALI., S.H., S.T., M.T

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**MARTIN MANURUNG., S.E., M.A
A-352**